

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan akuntansi investasi pada Pemerintah Kota Kupang khususnya pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengakuan awal investasi pada Pemerintah Kota Kupang dalam pengerjaan yang diterapkan, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah belum bisa dibilang telah sesuai, dikarenakan tidak ditemukannya informasi bukti pengakuan awal penyertaan modal yang dibuat/disusun oleh Pemerintah Kota Kupang, sehingga dari pada itu untuk pengkajian manfaat ekonomi dan sosial/jasa potensial tidak dapat dipastikan. Dan juga tidak ditemukan bukti berupa transaksi dalam bentuk jurnal pengakuan awal sehingga Pemerintah Kota Kupang tidak dapat mengukur nilai perolehan investasi secara memadai/andal (reliable). Hal tersebut belum sesuai dengan PSAP Nomor 06 Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi.
2. Proses Pengukuran Investasi dalam penerapannya juga belum sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana tidak ditemukan informasi pengeluaran pembiayaan dan penerimaan kembali atas nilai investasi dari BUMD Kota Kupang pada Laporan Operasional (LO) dan laporan beban awal atas penyertaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang,

sehingga hal tersebut juga belum sesuai dengan PSAP Nomor 06 Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi.

3. Pada Pelaporan/Pengungkapan Pemerintah Kota Kupang sudah melakukan penyajian pelaporan atas jumlah penyertaan modal pada BUMD kota Kupang baik yang mengalami penambahan nilai saldo penyertaan modal maupun yang mengalami kerugian. Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang disajikan pada Laporan Neraca pada tahun 2019.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaiannya penerapan akuntansi investasi yang dilakukan Pemerintah kota Kupang dengan peraturan perundang-undangan (PSAP No 06 Tahun 2016) adalah belum diterapkannya aturan yang mengatur tentang Akuntansi Investasi dengan baik oleh Pemerintah dan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia tentang penerapan PSAP No 06 Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi.

6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran kepada Kantor Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Kupang sebagai berikut :

1. Diharapkan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Kupang untuk melakukan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan/pengungkapan harus sesuai dengan PSAP Nomor 06 Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi dan menerapkannya semaksimal mungkin, sehingga pada penyajian laporan keuangan lebih optimal untuk tahun-tahun kedepannya.

2. Diharapkan agar Pemerintah Kota Kupang lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia sehingga dalam proses pengelolaan sistem keuangan bisa lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Angelica. M. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Fabozzi. (2000). *Manajemen Investasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- Martalena dan Malinda. 2011. *Pengantar Pasar Modal*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 yang diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.06 tentang Akuntansi Investasi. (Revisi 2016).
- Sari. J. 2018. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan)*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Siswanto dan Dewi. A.P. 2018. *Penerapan Akuntansi Investasi Jangka Panjang Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016*. Substansi, Vol.2 No.2, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tandelilin, Eduardus, 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Edisi pertama. Yogyakarta : Kanisius.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.